

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Kedua perkara yang ditangani oleh pengadilan berkaitan dengan pelanggaran yang serupa, yaitu memberikan suara lebih dari sekali pada pemilu, pemberian sanksi pidana terhadap para terdakwa tidak mencerminkan kesetaraan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Pada Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn, terdakwa Mardiyah Binti Anang Pahri dijatuhi hukuman pidana yang relatif ringan, yakni 15 hari penjara, meskipun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melibatkan anggota keluarga. Pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, terdakwa Sarce Lontonaung dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, yaitu 4 bulan penjara, karena terdakwa merupakan saksi partai politik.
2. Perbedaan pemberian sanksi dalam kedua putusan juga menunjukkan pentingnya evaluasi kembali terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan besarnya hukuman. Pada Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn, meskipun terdakwa melakukan pelanggaran dengan kesengajaan dan melibatkan faktor keluarga yang memberatkan, hukuman yang dijatuhkan terkesan tidak sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya. Sebaliknya, pada Putusan

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap yang menjadi alasan pemberat adalah karena terdakwa merupakan saksi partai politik.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis juga memberi saran sebagai berikut

1. Demi tercapainya keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan, disarankan agar hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran Pemilu lebih memperhatikan prinsip kesetaraan dalam pemberian sanksi. Pengadilan sebaiknya menghindari ketidakseimbangan dalam pemberian hukuman, mengingat bahwa pelanggaran yang serupa seharusnya mendapatkan hukuman yang proporsional dan setara. Dalam hal ini, faktor-faktor yang memberatkan, seperti hubungan keluarga atau keadaan lain yang relevan, perlu dijadikan pertimbangan yang lebih matang dalam keputusan hukum.
2. Mengingat perbedaan substansial antara kedua kasus, penilaian kontekstual terhadap tindakan terdakwa dapat menjadi penting. Mempertimbangkan konteks dan motivasi di balik setiap tindakan dapat membantu dalam menghasilkan putusan yang lebih adil dan mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini juga dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menunjukkan komitmen terhadap integritas pemilu.